

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN PEKUNCEN

Jl. Raya Ajibarang – Tegal Km 04 Banjaranyar No 9 Kode Pos 53164 Telp. (0281) 6439329 email:pekuncen@banyumaskab.go.id

Pekuncen, 10 Juli 2024

Nomor : AS/000.8.3.4/229/VII/2024

Sifat : Amat Segara Lampiran : 1 lembar

Hal : Undangan Rapat Koordinasi Pencegahan Petty Corruption terkait

penyelenggaraan pelayanan publik

Yth. Kepala Desa Se-Kecamatan Pekuncen

di

Tempat

Menindaklanjuti surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Nomor: 005/2961, tanggal 9 Juli 2024 perihal sebagaimana dalam pokok surat, dengan ini dimohon kehadiran Bapak/ Ibu Kepala Desa pada acara yang akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari/tanggal : Kamis, 11 Juli 2024

Waktu : Pukul 07.30 s/d 12.00 WIB.

Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Kecamatan Pekuncen

Acara : 1. Rapat Koordinasi pencegahan petty corruption terkait

penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah.

2. Roadshow Bus KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) secara

daring melalui zoom meeting.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

SAMAT PEKUNCEN,

ROJINGUN, M.Si Pembina Tingkat I 2730207 199303 1 003

Tembusan:

- 1. Pj. Bupati Banyumas:
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024

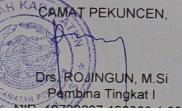
Waktu : Pukul 07.30 WIB s.d selesai

Tempat : Aula Lantai 2 Kantor Kecamatan Pekuncen

Acara : Undangan Rapat Koordinasi Pencegahan Petty Corruption terkait

penyelenggaraan pelayanan publik

NO.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	Dowi Marliani	Cilcanung	110
2.	R. Huryal.	krongga	1. Aug. 2.
3.	to moun	les plen	and I
4.	Sub-us have.	Do . Ver. Kenny.	3. 4. \
5.	folio 9	condinegara	1
6.	Gynawan Mk.	BiR	5. 6.
7.	lunger hodilum	Parisapra Gayl	1111
8.	Oki Trianto	Krajen	7. YMT 8.
9.	Odsan'	Semudo	0
10.	Slowo	Kades then you	9. 18 Source
11.	Muhshanuddin	Pasiraman lor	11.
12.	Kallan	12a dos Obkg	1/9 / 12 / JUDA
13.	Agus wiga	Callentin	13.
14.	Max hucl.	Karangklefer	14.
15.	Saguen	Pekar.	15.
16.	Sulardyanh.	Ciliany	16.
17.	Paridiant Arey &	·Perconen	17.
18.	Are Indri Cam.	Ke. pekuna	18.
19.	IRMAN-MURSETYO	PEKUNCEN	19.
20.	PANDU RAHANDUKA	PEKONZE	J W CH 20.
21.	thropo.	u	21.
22.	Sari Mulyani	Pekeincon	22
23.	Redus Cokrom	Vie Popule	23.
24.	Tati set-rarsh	Jac Pelancen	\$4 Juni
25.	Indri vani	Pekonen	25.
26.	Retro Davi M	barrow	26.
27.	Nurhay at	Peluru	27.
28.	Cusw ord	return	28.
29.	Zatnal b	tre	29.
30.	KAPUL SUW'NO	Clempan	My 30.
			4-0-1



NOTULA RAPAT

ZOOM MEET ROADSHOW JELAJAH ANTI KORUPSI BUS KPK 2024

HARI: Kamis, 11 JULI 2024

PUKUL: 08.00 s.d. selesai

Peserta : CAMAT PEKUNCEN, SEKCAM, KASI DAN STAFF, KADES DALAM WILAYAH KEC.

PEKUNCEN

ACARA Dibuka dan diawali dengan kegiatan:

- TARI SEMARANGAN OLEH SMA N 1 SEMARANG
- MENYANYIKAN INDONESIA RAYA
- BERDOA BERSAMA OLEH BAPAK YUSUF S.A.G
- PERSEMBAHAN PUISI ANTI KORUPSI OLEH ANANDA ALMIRA ISANOVA SISWI SMP N 22
 SEMARANG
- SAMBUTAN WALIKOTA SEMARANG IBU Dr. Ir. HJ EFIARTI RAHAYU S.sos
- PENYERAHAN SIMBOLIS PTSN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH GRATIS OLEH GUBERNUR
 IATENG
- SAMBUTAN PEJABAT GUBERNUR JATENG BAPAK KOMJEN.POL (P) Drs.NANA SUDJANA, M.M.
- PEMBUKAAN JELAJAH ANTI KORUPSI BUS KPK 2024 OLEH BAPAK GUBENUR JAWA TENGAH,BAPAK PIMPINAN KPK REPUBLIK INDONESIA DAN IBU WALIKOTA SEMARANG
- PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH PMD BANTUAN MILIK DAERAH OLEH PIMPINAN KPK REPUBLIK
 INDONESIA
- PENYERAHAN PENGHARGAAN APRESIASI KAMPANYE DAN KOORDINASI ANTI KORUPSI DENGAN KATEGORI PARIWARA ANTI KORUPSI OLEH PIMPINAN KPK REPUBLIK INDONESIA
- PENYERAHAN PENGHARGAAN KATEGORI INSTANSI SPD TERBAIK TAHUN 2023, SERTIFIKASI TANAH PMD TERBANYAK SERTA PENERTIBAN PRASARANA UTILITAS PERUMAHAN TERBANYAK DIWILAYAH JAWA TENGAH TAHUN 2023
- SAMBUTAN PIMPINAN KPK REPUBLIK INDONESIA BAPAK ALEXANDER MAWARTA AK.SH.MH.CFE
- PENYAMPAIAN MATERI DARI NARASUMBER YANG DIPANDU KEPALA SATUAN TUGAS KORDINASI DAN SUPERVISI KPK SELAKU MODERATOR BAPAK MARULITUA, PENYAMPAIAN MATERI OLEH BAPAK IRJEN.POL ANDRY WIBOWO, S.I.K., S.H., M.SI, BAPAK MUH.IMMANUDIN DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK KEMENPANRB, BAPAK INDRAZA MARZUKI CWBUDSMAN OF THE REPUBLIK OF INDONESIA
 - 1. (MENYAMPAIKAN TENTANG EVOLUSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK,TENTANG TIGA JENIS KORUPSI YAITU KORUPSI KECIL (PETTY CORRUPTION), KORUPSI POLITIK (POLITICAL CORRUPTION), KORUPSI BESAR (GRAND CORRUPTION),
 - PETTY CORRUPTION (KORUPSI KECIL)

 KORUPSI YANG MELIBATKAN JUMLAH UANG ATAU SUMBER DAYA YANG RELATIF KECIL

 DAN BIASANYA DILAKUKAN OLEH INDIVIDU ATAU KELOMPOK KECIL
 - POLITICAL CORRUPTION (KORUPSI POLITIK)

KORUPSI YANG MELIBATKAN POLITISI DAN PEJABAT TINGGI PEMERINTAHAN MANA MEREKA MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN MEREKA UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI ATAU PARTAI POLITIK MEREKA

GRAND CORRUPTION

KORUPSI YANG MELIBATKAN JUMLAH UANG ATAU SUMBER DAYA YANG SANGAT BESAR DAN BIASANYA DILAKUKAN OLEH PEJABAT TINGGI ATAU ORANG-ORANG YANG MEMILIKI PENGARUH BESAR

- 2. TENTANG KESEJAHTERAAN PNS & MASYARAKAT (ANGKA RATA-RATA
 ANGGARAN/PENDAPATAN SETIAP PNS DI SELURUH PROVINSI LEBIH TINGGI
 DIBANDINGKAN PENDAPATAN PER KAPITA)
- 3. KEJAHATAN TERJADI KARENA ADA NIAT DAN KESEMPATAN
- 4. UU NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
 - A. HUBUNGAN HUKUM
 - B. HAK DAN KEWAJIBAN
 - C. STANDAR PELAYANAN
 - D. MAKLUMAT PELAYANAN
 - E. PENGAWASAN MASYARAKAT
 - F. SANKSI

5. LANGKAH STRATEGIS PENCEGAHAN PETTY CORRUPTION

- A. ASPEK STRATEGIS
- REFORMASI BIROKRASI
- TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
- PENINGKATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI
- PELATIHAN DAN EDUKASI
- INTENSIF DAN SANKSI
- PARTISIPASI MASYARAKAT
- **B. KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK**
- SISTEM PELAYANAN TERPADU
- KEPATUHAN PEENRAPAN STANDAR PELAYANAN
- SISTEM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
- INOVASI PELAYANAN PUBLIK

6. KORUPSI SAMA DENGAN MALAADMINISTRASI

- KORUPSI ADALAH PENYELEWENGAN ATAU PENYALAHGUNAAN UANG NEGARA (PERUSAHAAN, ORGANISASI, YAYASAN, DAN SEBAGAINYA) UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI ATAU ORANG LAIN.(KBBI)
- MALAADMINISTRASI ADALAH PERILAKU ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM, MELAMPAU WEWENANG, MENGGUNAKAN WEWENANG UNTUK TUJUAN LAIN DARI YANG MENJADI TUJUAN WEWENANG BENTUK BENTUK KORUPSI DAN MALAADMINISTRASI, TERSEBUT TERMASUK KELALAIAN ATAU PENGABAIAN KEWAJIBAN HUKUM.

7. BENTUK-BENTUK MALADMINISTRASI DAN KORUPSI

A. MALADMINISTRASI

- -PENUNDAAN BERLARUT
- -TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN



- -TIDAK KOMPETEN
- -PENYALAHGUNAAN WEWENANG
- -PENYIMPANGAN PROSEDUR
- -PERMINTAAN IMBALAN
- -TIDAK PATUT
- -BERPIHAK
- -DISKRIMINASI
- -KONFLIK KEPENTINGAN

PASAL 11 PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, PENYELESAIAN LAPORAN

B. KORUPSI

- -KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
- -SUAP-MENYUAP
- -PENGGELAPAN DALAM JABATAN
- -PEMERASAN
- -PERBUATAN CURANG
- -BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN
- -GRATIFIKASI

UU NO.31 TAHUN 1999 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UU NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

8. KORELASI MALAADMINISTRASI DENGAN PETTY CORRUPTION

MALAADMINISTRASI MERUPAKAN AWAL DARI KORUPSI, BENTUK-BENTUK

MALAADMINISTRASI SANGAT BERPOTENSI MENJADI TINDAKAN KORUPSI YANG AKAN

BERAKIBAT MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI MASYARAKAT MAUPUN NEGARA.

9. LAPORAN DUGAAN MALAADMINISTRASI 2023

- -948 LAPORAN YANG DITERIMA OMBUDSMAN JATENG
- -164 LAPORAN YANG MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIEL UNTUK DILAKUKAN PEMERIKSAAN

A. SEKTOR PELAYANAN YANG DILAPORKAN

SEKTOR PELAYANAN YANG DILAPORKAN TERBANYAK YAKNI SEKTOR PENDIDIKAN DISUSUL OLEH LAPORAN TERKAIT PEMERINTAHAN DESA DAN KEPOLISIAN, SEMENTARA ISU AGRARIA DAN ENERGI MEMILIKI JUMLAH LAPORAN YANG LEBIH RENDAH NAMUN TETAP SIGNIFIKAN

B. PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH, YANG PALING SERING DILAPORKAN, ADALAH TERKAIT DENGAN PENDIDIKAN, TERUTAMA YANG MENGENAI PENDANAAN YANG TERBATAS DARI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH, YANG MENGAKIBATKAN ADANYA LAPORAN MASYARAKAT TERKAIT PERMINTAAN UANG DI SEKOLAH NEGERI OMBUDSMAN PADA TAHUN 2023 TELAH MELAKUKAN KAJIAN CEPAT UNTUK MEMBERIKAN SARAN PERBAIKAN DAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN SERTA TINDAKAN GUNA MENCEGAH PRAKTIK PETTY CORUPTION

C. JENIS INSTANSI YANG DILAPORKAN

SEKTOR PELAYANAN YANG DILAPORKAN TERBANYAK YAKNI PEMRINTAHAN KABUPATEN, DISUSUL PLN SELANJUTNYA PEMKOT, POLRES DAN BPJS SERTA KANTOR PERTANAHAN

10. PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK OLEH OWBUDSMAN RI DI JAWA TENGAH

A. HASIL PENILAIAN JAWA TENGAH TAHUN 2022 DAN 2023

BANYAK YANG MENGALAMI PENINGKATAN CONTOHNYA PEMKAB KARANGANYAR, PEMKOT PEKALONGAN

B. KESIMPULAN HASIL PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN RI DI JAWA TENGAH

- -SECARA UMUM TERDAPAT PENINGKATAN HASIL PENILAIAN YANG SIGNIFIKAN DI TAHUN 2023
- -PADA TAHUN 2023 TERDAPAT 5 KABUPATEN YANG MENGALAMI PENURUNAN NILAI DIBANDINGKAN DENGAN HASIL TAHUN 2022
- -DINAS PENDIDIKAN, DINAS SOSIAL DAN DINAS KESEHATAN MASID ADA YANG MASUK DALAM ZONA KUNING

PETTY CORRUPTION MENYEBABKAN MASALAH YANG BESAR, SEMOGA PETTY CORRUPTION DI JAWA TENGAH BISA BERKURANG SEHINGGA DAPAT MENGURANGI TINGKAT KORUPSI DI PROVINSI JAWA TENGAH

11. MIND MAPPING: KONTRUKSI BERBANGSA DAN BERNEGARA

PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA(NKRI) DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

PILAR KEBANGSAAN TERSEBUT HARUS KOKOH KARENA BERFUNGSI SEBAGAI PENANGKAL GANGGUAN DAN ANCAMAN YANG MENGINTAI BAIK DARI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI

PANDANGAN HIDUP BANGSA

PEMERSATU NKRI, PEMBIMBING ELEMEN BANGSA, MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN

DASAR NEGARA

SUMBER HUKUM NEGARA, CITA-CITA BANGSA, KEPRIBADIAN BANGSA

IDEOLOGI NEGARA

STANDAR NILAI DALAM BERDEMOKRASI, IDENTITAS BANGSA, MENGGERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU 2025

KONTRUKSI BERBANGSA DAB BERNEGARA MENJADI HAL FUNDAMENTAL MENUJU INDONESIA EMAS 2045

ANCAMAN

EKSTRIMISME DAN RADIKALISME, IMPERIALIASI BUDAYA, POLITIK IDENTITAS, KERUSAKAN LH, KELANGKAAN PANGAN, BIROKRASI YANG KORUP, MENTALITAS GEN Z

TANTANGAN

GLOBALISASI, KESENJANGAN SOSIAL DAN EKONOMI, PROXY WAR

HAMBATAN

KORUPSI KOLUSI NEPOTISME, PUNGLI DAN MENTALITAS ELIT

GANGUAN



PROPAGANDA DAN PENCITRAAN, KONFLIK SOSIAL DAN POLITIK

12. PENYEBAB UMUM TERJADINYA PUNGLI

LAYANAN

KETIDAKPASTIAN LAYANAN AKIBAT ADANYA PROSEDUR PELAYANAN YANG PANJANG DAN MELELAHKAN

• SDM

TERBATASNYA SUMBER DAYA MANUSIA

FAKTOR EKONOMI

PENGHASILAN YANG TIDAK MENCUKUPI KEBUTUHAN HIDUP ATAU TIDAK SEBANDING DENGAN TUGAS YANG DIEMBAN

WEWENANG

PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN ATAU KEWENANGAN YANG ADA/MELEKAT PADA SESEORANG

PENGAWASAN

LEMAHNYA SYSTEM KONTROL DAN PENGAWASAN OLEH ATASAN

KULTUR/BUDAYA

BUDAYA PUNGUTAN LIAR YANG TERBENTUK DAN BERJALAN MENERUS DAPAT MENYEBABKAN PUNGUTAN LIAR SEBAGAI HAL BIASA

- PELAKU PUNGLI
- 1. PEGAWAI PADA INSTANSI NEGARA
- 2. M.ASYARAKAT (PREMAN, ORMAS, DLL)
- 3. PEGAWAI PADA INSTANSI NEGARA BERKOLABORASI DENGAN MASYARAKAT
- TITIK RAWAN PUNGLI
- 1. AKTE KELAHIRAN
- 2. BIDANG PENDIDIKAN
- 3. PERIZINAN DAN SERTIFIKAT
- 4. MENCARI PEKERJAAN
- 5. SKEP JABATAN
- 6. BUKU NIKAH
- 7. SURAT PENSIUN
- 8. SURAT KEMATIAN

POTENSIAL HAZARD TERJADINYA PUNGLI KETIKA MANUSIA DALAM BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK

LAPORAN ADUAN PUNGLI

LAPORAN YANG MASUK MELALUI SIDULI & SP4N LAPOR : 165 LAPORAN PROVINSI JAWA TENGAH : 7 LAPORAN

- 1. KABUPATEN BOYOLALI
- 2. KOTA SEMARANG
- 3. KABUPATEN KEBUMEN
- 4. KABUPATEN KUDUS
- 5. KABUPATEN DEMAK
- 6. KABUPATEN BATANG
- 7. KABUPATEN SUKOHARJO

13. KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2024 FUNGSI SATGAS SABER PUNGLI

A. INTELLIEN

KEGIATAN INTELIJEN

DETEKSI, IDENTIFIKASI & PENILAIAN TERJADINYA PUNGLI

B. PENCEGAHAN

MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN SECARA KOMPREHENSIF & DORONG PERAN AKTIF MASYARAKAT

C. PENINDAKAN

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGLI DISELURUH SENTRA PELAYANAN PUBLIK

14. UPAYA PENCEGAHAN PUNGLI

- SISTEM BIROKRASI/APARATUR YANG HANDAL, TRANSPARAN, PROFESIONAL
- SISTEM BIROKRASI YANG DIGITAL
- KOMITMEN KEPALA DAERAH/LEMBAGA UNTUK MELAYANI MASYARAKAT
- APIP YANG EFEKTIF DALAM MEMBANGUN EFEK CEGAH
- PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF DALAM MEMBANGUN EFEK JERA
- PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PEMERINTAHAN
- SESI TANYA JAWAB
- FOTO BERSAMA

PENUTUP

NOTULEN :

ARIE INDRIYANI

KEGIATAAN RAKOR PENCEGAHAN PETTY CORRUPTION DAN ROADSHOW BUS KPK MELALUI ZOOM MEET

KAMIS, 11 JULI 2024

